

Peran Gender dalam Badan Legislatif Mahasiswa Pendidikan Sosiologi : Perspektif Sosiologi Organisasi

Akhtar Rio Hidayat

Universitar Negeri Jakarta

Farhan Pria Syawaldi

Universitas Negeri Jakarta

Ridho Syafiq

Universitas Negeri Jakarta

Alamat : Jl. R.Mangun Muka Raya No.11, RT.11/RW.14, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung,
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220

Korespondensi penulis : ridhosyafiq46@gmail.com

Abstract. *This study aims to find out about the form of gender equality within the scope of student organizations of the Sociology Education Student Legislature. This research has several problem formulations, namely 1. How do Student legislators view gender roles in the Student legislature? As well as his participation and contribution. 2. What are the obstacles to running for president of the Student Legislature? This study used a qualitative descriptive method with source triangulation as data validity. Data were obtained through observations and interviews conducted in each member of the Sociology Education Student Legislature. The results showed that from all organizations there was a majority of women as leaders of the organization, while women served as members. In this study, it can be seen that women dominate the running of the Student Legislature, in contrast to other campus government organizations that are more dominated by men.*

Keywords: *Gender Roles, Student Legislature, Sociology Education*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai wujud kesetaraan gender di lingkup organisasi mahasiswa Badan Legislatif Mahasiswa Pendidikan Sosiologi. Penelitian ini mempunyai beberapa rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana Anggota Legislatif Mahasiswa dalam melihat peran gender dalam Badan legislatif Mahasiswa? Serta Partisipasi dan kontribusinya. 2. Apa saja Hambatan dalam mencalonkan diri sebagai ketua Badan Legislatif Mahasiswa?. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan triangulasi sumber sebagai validitas data. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara yang dilakukan di masing-masing anggota Badan Legislatif Mahasiswa Pendidikan Sosiologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari semua organisasi terdapat mayoritas perempuan sebagai pimpinan organisasi, sedangkan perempuan menjabat sebagai anggota. Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa perempuan yang lebih mendominasi berjalannya Badan Legislatif Mahasiswa ini, berbeda dengan organisasi pemerintahan kampus lainnya yang lebih di dominasi oleh laki-laki.

Kata Kunci: Peran gender, Badan Legislatif Mahasiswa, Pendidikan Sosiologi

PENDAHULUAN

Di kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa pendidikan sosiologi, mengapa kandidat pemimpin organisasi Badan Legislatif Mahasiswa Pendidikan Sosiologi lebih didominasi oleh perempuan. Minimnya sosialisasi mengenai Badan Legislatif Mahasiswa sehingga ketertarikan laki-laki pun kurang untuk mengikuti organisasi ini. Dalam pengisian setiap divisi dalam organisasi pun juga lebih di dominasi oleh kalangan perempuan sebagai koordinator setiap divisi. Pada organisasi ini, ketuanya di pimpin oleh perempuan, fenomena ini sangat berbeda dengan organisasi lain, yang dimana laki-laki yang sangat mendominasi dalam sebuah organisasi. Maka dari itu dapat dilihat bahwa adanya perkembangan yang sangat pesat untuk meningkatkan derajat perempuan agar tidak dipandang sebelah mata karena dinilai tidak mempunyai kredibilitas untuk memimpin.

Gagasan kesetaraan gender adalah salah satu prinsip filsafat Indonesia. Fakta bahwa peraturan dan regulasi tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG) disahkan pada tahun 2012 semakin mendukung hal ini. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional semakin memperkuatnya. Undang-undang yang mengatur kesetaraan gender sudah ada dan tampaknya telah diikuti.

KAJIAN TEORI

Menurut Demartoto (2007), gender adalah faktor hubungan sosial yang berhubungan dengan perbedaan seksual manusia. Kata "gender" berasal dari bahasa Inggris, di mana definisi seks dan gender bersifat ambigu. Penting untuk memahami perbedaan antara kata seks dan gender untuk memahami gagasan gender. Perbedaan jenis kelamin berdasarkan konstruksi sosial atau konstruksi sosial, sedangkan jenis kelamin adalah perbedaan jenis kelamin berbasis biologis. Menurut interpretasi Astiti tentang gender, ada interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan. Hubungan sosial pria dan wanita berkembang dan berubah sebagai hasil dari interaksi mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Heddy Shri Ahimsha Putra (2000), istilah "gender" dapat dipecah menjadi makna sebagai berikut: gender sebagai istilah dengan makna tertentu, gender sebagai fenomena sosial budaya, gender sebagai kesadaran sosial, gender sebagai masalah sosial budaya, gender sebagai konsep untuk analisis, dan gender sebagai cara memandang dunia. Paradigma feminis, yang didasarkan pada dua teori, fungsionalisme struktural dan konflik, berfungsi sebagai dasar bagi sebagian besar studi gender. Sekolah fungsionalisme struktural menolak gagasan bahwa

masyarakat terdiri dari beragam komponen yang berinteraksi satu sama lain. Hipotesis ini memburu komponen dasar yang membentuk masyarakat.

Hilary M. Lips menggambarkan gender sebagai harapan masyarakat yang ditempatkan pada pria dan wanita dalam bukunya *Sex and Gender*. Misalnya, wanita terkenal karena baik, cantik, sensitif, dan keibuan. Sedangkan laki-laki dipandang sebagai orang yang kuat, jantan, logis, dan kuat. Fitur-fitur ini dapat digunakan untuk menggambarkan pria atau wanita; Misalnya, ada pria yang baik dan wanita yang kuat, cerdas, dan kuat. Perubahan karakteristik fitur ini mungkin terjadi kadang-kadang dan di tempat yang berbeda (Mansour Fakih, 1996).

Secara umum, perbedaan antara laki-laki dan perempuan jika dilihat dari nilai dan perilaku adalah definisi gender. Menurut *Women Studies Encyclopedia*, gender adalah gagasan budaya yang berusaha membedakan antara pria dan wanita ketika mereka muncul di masyarakat dalam hal peran, tindakan, mentalitas, dan sifat emosional. Ketika nilai-nilai dan perilaku dipertimbangkan, gender adalah perbedaan yang dapat dilihat antara laki-laki dan perempuan. Istilah "gender" digunakan untuk mendefinisikan perbedaan sosial antara pria dan wanita. Pria dan wanita sama-sama memiliki seperangkat karakteristik budaya dan perilaku yang disebut sebagai gender.

Gender adalah gagasan tentang hubungan sosial yang membagi (atau membedakan) tugas dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Perbedaan antara tugas dan fungsi laki-laki dan perempuan dibuat berdasarkan posisi, fungsi, dan peran relatif mereka dalam berbagai aspek kehidupan dan perkembangan mereka daripada pada perbedaan biologis atau fisiologis.

Dengan demikian, gagasan gender adalah produk dari kecerdasan atau rekayasa manusia, yang diciptakan oleh masyarakat sedemikian rupa sehingga bersifat dinamis dan dapat berubah karena variasi dalam adat istiadat, budaya, agama, dan sistem nilai negara, komunitas, dan etnis tertentu. Selain itu, gender dapat berubah karena perkembangan sejarah, pergeseran politik, ekonomi, sosial, dan budaya, atau karena kemajuan dalam pembangunan.

Pusat penelitian gender dan peningkatan kualitas perempuan (2001), bunga rampai pedoman dan bahan pembelajaran pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional (2004), dan literatur lain yang membahas gender antara lain dipaparkan oleh Megawangi (1999), Darahim (2003), dan literatur lainnya antara lain menyimpulkan bahwa seks dan gender adalah konsep yang berbeda. Jenis kelamin menggambarkan perbedaan fisik antara jenis kelamin, pria dan wanita, sebagaimana ditentukan oleh biologi. Kesenjangan jenis kelamin adalah kekal dan global karena mereka adalah bagian dari sifat atau pemeliharaan Allah. Bertentangan dengan situasi dengan gender, yang digambarkan sebagai perbedaan antara

peran, sifat, kewajiban, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang diproduksi, dibuat, dan dibangun oleh masyarakat dan dapat berubah sesuai dengan zaman.

Istilah "isu gender" mengacu pada masalah ketidaksetaraan yang memiliki efek buruk pada laki-laki dan perempuan, tetapi khususnya perempuan. Misalnya, subordinasi (penomoratan), keyakinan bahwa perempuan lemah, tidak mampu mengambil inisiatif, dan cengeng. Perempuan dengan demikian adalah yang kedua setelah laki-laki.

Kesetaraan gender adalah salah satu prinsip utama demokrasi karena memastikan bahwa semua segmen masyarakat memiliki akses yang sama terhadap peluang. Ketidakmampuan untuk mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi sering disebabkan oleh ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Individu yang kuat secara struktural dan budaya dapat mendiskriminasi individu yang mengalami ketidakadilan ini. Kesejahteraan pihak-pihak yang kurang beruntung dan tersubordinasi dapat terkena dampak negatif dari perlakuan diskriminatif dan ketidaksetaraan. Sampai sekarang, diskriminasi berbasis gender telah bertahan hampir di mana-mana di dunia, bahkan di negara-negara di mana demokrasi terlihat telah didirikan. Perempuan lebih mungkin dibandingkan laki-laki untuk menghadapi diskriminasi dalam situasi ini, namun bukan tidak mungkin bagi laki-laki juga. Hambatan terbesar untuk transformasi sosial adalah standarisasi posisi dalam masyarakat. Dalam hal masalah gender, perempuan lebih mungkin mengalami efek negatif secara internasional.

Berbagai strategi sedang dicari untuk mengurangi kerugian sosial yang disebabkan oleh kesenjangan gender. Tindakan ini diambil pada tingkat lokal, nasional, dan seluruh dunia oleh individu, kelompok, dan bahkan negara. Inisiatif ini bertujuan untuk menegakkan hak asasi manusia yang setara, mendorong pembuat kebijakan proaktif untuk mengatasi ketidaksetaraan gender, dan memperluas keterlibatan politik. Hukum masyarakat Indonesia, yang dikenal sebagai hukum adat, dipraktikkan secara luas di seluruh negeri dan memiliki berbagai pola dan sifat. Mayoritas hukum yang membentuk hukum adat Indonesia dikembangkan dan diikuti oleh masyarakat yang menerapkannya. R.A. Kartini adalah kekuatan pendorong di balik perjuangan untuk pembebasan perempuan Indonesia, perjuangan yang dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka dan akhirnya menjadi terkenal. Meskipun pengakuan tersebut tersirat dalam Pasal 27 UUD 1945, namun belum sepenuhnya terwujud di banyak bidang masyarakat.

Masih ada prasangka terhadap perempuan, seperti yang terlihat dari hasil undang-undang dan peraturan yang masih membahas masalah gender. Sebuah ilustrasi UU No. 1 Tahun 1974, yang di permukaan tampak melindungi perempuan dengan menjunjung tinggi cita-cita

monogami, namun jika dicermati lebih dekat memperbolehkan suami untuk melakukan poligami tanpa membatasi jumlah perempuan yang boleh mereka nikahi Ketentuan Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1984, yang menyatakan sebagai berikut, digunakan sebagai titik acuan ketika berbicara tentang topik diskriminasi terhadap perempuan. Untuk tujuan konvensi saat ini, "diskriminasi terhadap perempuan" mengacu pada setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan berbasis jenis kelamin yang memiliki efek atau tujuan mengurangi atau menghilangkan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar oleh perempuan terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam politik, bidang ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau bidang lainnya.

Menurut definisi dalam Pasal 1 di atas, diskriminasi terhadap perempuan atau terhadap perempuan mengacu pada diferensiasi, pengecualian, atau pembatasan berdasarkan jenis kelamin. Akibatnya, ada undang-undang dan peraturan yang merugikan perempuan, seperti Undang-Undang Pajak, Undang-Undang Perkawinan, dan lain-lain. Pertama-tama kita harus memahami perbedaan antara gender dan jenis kelamin (sex) untuk memahami studi kesetaraan gender. Salah satu alasan penolakan untuk menerima analisis gender dari masalah ketidakadilan sosial adalah kurangnya pengetahuan tentang konsep gender. Hungu (2007) mengatakan "seks (jenis kelamin) merupakan perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis sejak seseorang lahir. Seks (jenis kelamin) berkaitan dengan tubuh laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki memproduksi sperma, sementara perempuan menghasilkan sel telur dan secara biologis mampu untuk menstruasi, hamil dan menyusui. Perbedaan biologis dan fungsi biologis laki-laki dan perempuan tidak dapat dipertukarkan diantara keduanya".

Sementara secara etimologis, gender mengacu pada perbedaan jenis kelamin yang telah dikembangkan seseorang untuk diri mereka sendiri selama proses sosial-budaya yang berlarut-larut. Pria dan wanita berperilaku berbeda karena berbagai alasan, termasuk proses biologis, sosial, dan budaya. Akibatnya, gender dapat berfluktuasi di seluruh strata sosial ekonomi masyarakat serta dari satu lokasi ke lokasi lain.

Perbedaan antara jenis kelamin dan jenis kelamin, menurut definisi di atas, adalah bahwa jenis kelamin lebih dipengaruhi oleh penampilan fisik seseorang, tetapi jenis kelamin lebih dipengaruhi oleh perilakunya. Selain itu, meskipun gender adalah posisi yang diperoleh, seks adalah status yang melekat atau alami. Gender diciptakan secara sosial daripada biologis. Karena gender diperoleh daripada diwariskan saat lahir.

Tahap selanjutnya adalah memahami apa arti "Kesetaraan Gender" setelah kita menetapkan perbedaan antara jenis kelamin dan gender. Kesetaraan gender merupakan persyaratan bagi laki-laki dan perempuan untuk memiliki kesempatan dan hak yang sama sebagai manusia, untuk dapat berpartisipasi secara setara dalam semua aspek pertahanan dan keamanan nasional, termasuk kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan (hankamnas), dan untuk mendapatkan manfaat yang sama dari hasil pembangunan. Menghilangkan ketidakadilan sistemik dan diskriminasi terhadap laki-laki dan perempuan adalah aspek lain dari kesetaraan gender.

Keadilan gender dan kesetaraan gender saling terkait. Perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan adalah bagian dari proses keadilan gender. Kurangnya prasangka terhadap laki-laki dan perempuan adalah tanda bahwa kesetaraan dan keadilan gender telah terwujud. Sehingga setiap orang dapat memperoleh keuntungan yang sama dan adil dari pengembangan dan memiliki akses ke sana serta kesempatan untuk berpartisipasi di dalamnya dan memiliki pengaruh terhadapnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, serta mendeskripsikan berbagai realita sosial yang ada dalam masyarakat, lalu kemudian mengangkat ke permukaan tentang karakter ataupun gambaran tentang kondisi dan sesuatu tertentu (Bungin, 2015). Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber sebagai validitas data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara terhadap setiap anggota organisasi Badan Legislatif Mahasiswa Pendidikan Sosiologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Organisasi Badan Legislatif Mahasiswa

Organisasi kemahasiswaan memberikan ruang atau forum kepada mahasiswa laki-laki dan perempuan untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitasnya dalam bentuk aspirasi, inisiasi, dan gagasan yang positif dan kreatif. Individu terikat bersama melalui hubungan kerja sama, yang memiliki tujuan bersama yang secara logis dan metodis diarahkan oleh seorang pemimpin. Laki-laki dan perempuan harus bekerja sama dengan baik, dan mereka berdua harus memiliki hak dan tanggung jawab yang sama agar

perdamaian dapat menang bagi sebuah organisasi untuk berhasil. Karena baik pria maupun wanita memiliki kekuatan dan kelebihan yang dibutuhkan untuk dapat dipercaya. Namun pada kenyataannya, yang terjadi adalah orang secara konsisten menerima pekerjaan yang tidak efektif dari orang lain.

Perempuan ditekankan dalam domain publik yang berbeda termasuk kepemimpinan dan tugas sosial, sedangkan laki-laki diberi preferensi dalam bidang pekerjaan rumah tangga. Dalam kelompok mahasiswa, peran perempuan kadang-kadang masih terbatas pada peran tradisional feminin seperti pelayanan, sekretaris, dan bendahara sementara laki-laki memegang posisi kepemimpinan.

Para pemimpin masa depan bangsa, yang merupakan mahasiswa, akan memutuskan bagaimana masyarakat Indonesia berkembang di tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu siswa harus memiliki berbagai informasi dan keterampilan yang mempromosikan kompetensi diri. Namun, informasi yang disajikan di kelas tidak cukup untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan mereka, menumbuhkan pandangan yang lebih positif, dan membangun karakter yang lebih kuat (Setiawan dan Rahayu, 2021: 111).

Akibatnya, sejumlah besar siswa akhirnya menunjukkan minat dan bergabung dengan kelompok siswa sebagai tempat untuk memperoleh soft skill yang diperlukan. Siswa dapat mengembangkan diri mereka dengan lebih baik di bidang-bidang ini dengan menjalankan tanggung jawab, disiplin, dan semangat kepemimpinan. Laki-laki dan perempuan secara alami diperlakukan sama dalam struktur administrasi kelompok mahasiswa. Kedua belah pihak diharuskan untuk memenuhi kewajiban dan hak tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan hak perempuan dan pembagian tugas di tingkat organisasi Legislatif Mahasiswa Pendidikan Sosiologi tidak lagi terbatas pada rumah. Perempuan yang sebelumnya hanya diizinkan untuk berpartisipasi dalam pelayanan, konsumsi, dan aspek dekoratif dari kegiatan organisasi sebagai bendahara dan sekretaris sekarang memainkan peran yang setara dan adil bersama laki-laki.

Perempuan mulai berpartisipasi penuh dalam kegiatan organisasi tanpa memandang jenis kelamin mereka sehingga mereka dapat mengambil bagian dalam berbagai kegiatan sebagai anggota organisasi dengan hak dan peran yang sama, seperti membuat aturan, membuat keputusan, mengungkapkan pendapat mereka selama pertemuan atau musyawarah, dan memegang posisi untuk melakukan semua tugas kepemimpinan mereka.

Masyarakat adalah entitas sosial dengan karakter dinamis. Seiring perubahan zaman dan masyarakat, demikian juga perilaku dan cara berpikir masyarakat. Mirip dengan ini, konstruksi sosial gender, yang menentukan bagaimana laki-laki dan perempuan diberi tugas dan tanggung jawab, adalah konsep yang ada di masyarakat dan dinamis atau dapat berubah dan dimodifikasi, dapat dipertukarkan, bukan sesuatu yang datang secara alami kepada orang, dan bukan sesuatu yang permanen (Dalimoenthe, 2021).

Pada sebagian besar Badan Legislatif Mahasiswa Pendidikan Sosiologi Perempuan berpartisipasi dalam posisi seperti ketua dan wakil ketua organisasi, eksekutif puncak dalam pelaksanaan rencana kerja, dan direktur divisi dan departemen. Perempuan yang menjadi ketua atau wakil ketua dalam organisasi diperlakukan sama dengan laki-laki dalam segala hal.

Mayoritas wanita melaporkan bahwa pendapat mereka cukup dipertimbangkan saat membuat keputusan dalam rapat. Perempuan memiliki kebebasan dan hak hukum untuk berbagi ide-ide mereka dan memiliki sudut pandang yang diakui dan diperhitungkan ketika membuat pilihan. Selain itu, semua tugas dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi seperti program kerja ditugaskan sama tanpa memandang jenis kelamin seseorang.

Seperti yang telah penulis dapatkan fakta di lapangan, yaitu dengan mewawancarai Anggota Badan Legislatif Mahasiswa Pendidikan Sosiologi. Penulis mewawancarai narasumber yang bernama Lia karunia, ia merupakan angkatan 2022 dan memiliki jabatan di Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) sebagai Ketua Fraksi 22 dan Komisi Pengawasan 1. Dalam organisasi Badan Legislatif Mahasiswa Pendidikan Sosiologi, jumlah anggota sebanyak 24 orang, diantaranya laki-laki yang berjumlah 4 orang, dan perempuan yang berjumlah 20 orang. Seperti yang kita ketahui bahwa jumlah antara perempuan dan laki-laki dalam anggota legislative ini sangat tidak setara, lalu apa yang menjadi penyebabnya? Berdasarkan wawancara yang dilakukan Narasumber mengatakan bahwa:

“jumlah perempuan dan laki-laki tidak rata karena pihak laki-laki tidak terlalu berminat untuk masuk BLM, karena kinerjanya tidak terlalu banyak jadi laki-laki kebanyakan mengikuti organisasi yg banyak kegiatan fisiknya, sebab BLM tugasnya hanya mengawas saja”.

Lalu Bagaimana pandangan narasumber dalam melihat peran gender dalam BLM? Ia mengatakan bahwa:

“Di BLM tidak ada atau tidak berpengaruh yang namanya perbedaan gender karena semuanya bekerja sesuai dengan kinerja masing-masing”.

Lalu apa yang menjadi perbedaan gender partisipasi dan kontribusi di BLM? Ia mengatakan bahwa:

“anggota BLM sangat berkontribusi sesuai dengan tugas dan kinerja mereka masing-masing, jadi tidak ada namanya perbedaan, karena sama rata semua. Misalnya tugas berat buat laki-laki dan yang ringan buat perempuan, itu tidak ada, semua tugas memiliki kesetaraan”.

Bagaimana peran BLM yg dipenuhi oleh mayoritas perempuan yang akhirnya mempengaruhi persepsi masyarakat kepada perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan? Ia mengatakan bahwa:

“Dengan adanya pertanyaan ini kita bisa lihat bahwa perempuan juga bisa memimpin dengan baik dan bukan hanya laki-laki yg bisa memimpin”.

Apa perasaan narasumber dengan adanya mayoritas perempuan di BLM Ini serta apa keuntungan dan tantangannya? Ia mengatakan bahwa:

“Keuntungannya adalah karena mayoritas perempuan jadi para anggota lebih gampang bekerja sama dalam menyusun proker dll, dengan adanya mayoritas perempuan ini ada juga tantangannya yaitu perbedaan pendapat atau adanya sedikit perselisihan tapi langsung diselesaikan”.

Apa yang menjadi hambatan dalam menjadi pemimpin BLM? Ia mengatakan bahwa:

“Hambatannya adalah belum terlalu ada hambatannya, karena dari dahulu kala pemimpin BLM adalah perempuan jadi untuk seorang perempuan untuk menjadi pemimpin BLM itu lebih gampang untuk menduduki posisi itu”.

Apa saran narasumber untuk meningkatkan peran mahasiswa dalam BLM?

“Lebih mengeratkan hubungan antara organisasi lain dengan BLM”.

Keinginan untuk mendapatkan tugas dan hak yang sama dengan laki-laki agar mampu menduduki posisi penting dalam organisasi berdampak pada keterlibatan perempuan yang memegang posisi ketua dan wakil ketua perkumpulan. Ini sering menunjukkan pergeseran persepsi dan perilaku social Anggota Badan Legislatif Mahasiswa Pendidikan Sosiologi

bersedia menerima kesetaraan gender dalam tugas dan hak untuk mengurangi ketidakadilan gender.

Menurut teori feminis, gagasan feminisme menempatkan penekanan yang lebih besar pada persamaan hak, keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja, pendidikan, kebebasan seksual, dan kebebasan reproduksi. Ketika perempuan mendorong persamaan hak dengan laki-laki, feminisme didirikan. Perempuan memegang pandangan yang memposisikan dan mengkondisikannya. Perempuan dalam masyarakat memiliki kekuatan untuk mengubah dan mencapai kesetaraan sosial dengan laki-laki. Pergeseran sosial melahirkan gagasan pemikiran feminis. Feminisme dengan demikian bertujuan untuk membela hak-hak perempuan sebagai kelas sosial secara keseluruhan. (2021:44 Daalimoenthe).

Hak dan peran perempuan yang lebih transparan dapat menumbuhkan kerukunan dan hubungan kerja yang sangat baik antara laki-laki dan perempuan, yang akan meningkatkan manajemen organisasi. Pria dan wanita sama-sama dapat diandalkan dan saling melengkapi karena keduanya memiliki kekuatan yang tidak dapat dibandingkan pada skala yang lebih baik atau lebih buruk. Diperkirakan bahwa perempuan memiliki potensi kepemimpinan yang dapat dibandingkan dan dipertimbangkan bersama laki-laki. Hal ini konsisten dengan hipotesis keseimbangan yang dikeluarkan oleh Pilcher dan Whelehan (2004) ketika memeriksa bagaimana gender diposisikan dalam masyarakat. Sedangkan dalam teori ini, penekanannya adalah pada kemungkinan hubungan yang sehat dan harmonis antara laki-laki dan perempuan jika mereka bekerja sama untuk mencapai harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan dalam berbagai konteks, termasuk rumah, masyarakat, dan negara. Namun, peran laki-laki dan perempuan tidak dikontraskan dalam pandangan ini (Dalimoentthe, 2021: 36).

Menurut ide ini, hubungan pria dan wanita tidak perlu dibagi berdasarkan faktor struktural dan fungsional karena keduanya memiliki kelebihan dan kekuatan yang dapat diandalkan, dan jika digabungkan, mereka akan bekerja sama dengan baik. Perempuan memperjuangkan peran dan hak gender karena ketidaksetaraan gender secara tidak sengaja menghasilkan peran gender yang mempromosikan ketidaksetaraan gender. Menurut sosiologi gender, peran dicirikan sebagai elemen dinamis dari status, di mana status lebih erat kaitannya dengan posisi sedangkan peran lebih mementingkan penampilan luar. Posisi dan penampilan termasuk dalam makna yang biasanya ada dalam masyarakat, peran yang

berhubungan dengan hal-hal yang harus dilakukan atau dimainkan oleh seseorang tergantung status yang dimilikinya. Peluang, kesempatan, atau apapun yang harus diperoleh atau diperoleh oleh masing-masing individu berkaitan dengan hak. Kebebasan berekspresi perempuan dibatasi oleh kompartementalisasi kualitas, sikap, dan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dianggap cocok dan tidak patut, pantas dan tidak pantas, serta pantas dan tidak pantas.

Peran produktif, reproduksi, dan sosial yang dimainkan pria dan wanita dalam masyarakat membedakan mereka satu sama lain. berkonsentrasi pada fungsi masyarakat sosial dalam kaitannya dengan semua tugas yang harus dilaksanakan dan direncanakan oleh laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Meskipun mereka disebutkan secara tegas, hak asasi perempuan.

Menurut Muhadjir (2015: 166) dan Danik (2015: 122), sikap patriarki yang melihat laki-laki sebagai superior dan perempuan sebagai tunduk dalam masyarakat harus disalahkan atas masalah marginalisasi perempuan. Budaya patriarki ini tercermin dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, dan berfungsi sebagai pembenaran untuk sistem pembagian kekuasaan, pengambilan keputusan, pembagian kerja, kepemilikan, dan seksisme dalam alokasi sumber daya. Deaux dan Kite menjelaskan bahwa gender adalah konstruksi sosial dan budaya yang membuat perbedaan antara sifat-sifat yang maskulin dan feminin. Karena adanya sistem kepercayaan gender, gender dapat eksis dalam kehidupan masyarakat. Partini (2013) dikutip dalam Dalimoenthe 2021:13.

Oleh karena itu, pengorganisasian melalui kegiatan atau program kerja yang terkait dengan pendidikan gender mengharuskan siswa memiliki konsep dasar kesetaraan gender. Misalnya, ketika siswa baru harus menghadiri pelatihan kepemimpinan untuk bergabung dengan organisasi terkait, konten terkait gender dapat dimasukkan untuk mendorong siswa mempertimbangkan memberi pria dan wanita posisi dan hak yang sama. Selain itu, direncanakan bahwa semua kelompok kampus akan mengambil peran yang lebih aktif dalam mengembangkan program kerja yang membahas gender melalui seminar dan debat.

KESIMPULAN

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, ditemukan bahwa dari masing-masing struktur organisasi tersebut yang menduduki jabatan sebagai Ketua Umum atau selaku pemimpin organisasi adalah sosok seorang perempuan. Sedangkan peran laki-laki rata-rata terletak pada posisi anggota atau staff. mengapa kandidat pemimpin organisasi Badan Legislatif Mahasiswa Pendidikan Sosiologi lebih didominasi oleh perempuan karena minimnya sosialisasi mengenai Badan Legislatif Mahasiswa sehingga ketertarikan laki-laki pun kurang untuk mengikuti organisasi ini. Dalam pengisian setiap divisi dalam organisasi pun juga lebih di dominasi oleh kalangan perempuan sebagai koordinator setiap divisi. Pada organisasi ini, ketuanya di pimpin oleh perempuan, fenomena ini sangat berbeda dengan organisasi lain, yang dimana laki-laki yang sangat mendominasi dalam sebuah organisasi. Maka dari itu dapat dilihat bahwa adanya perkembangan yang sangat pesat untuk meningkatkan derajat perempuan agar tidak dipandang sebelah mata karena dinilai tidak mempunyai kredibilitas untuk memimpin.

SARAN

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis paparkan diatas, maka disini penulis akan memberikan saran kepada Badan Legislatif Mahasiswa Pendidikan Sosiologi, yaitu hendaknya memberikan sosialisasi mengenai organisasi tersebut, agar mahasiswa pendidikan sosiologi yang lain bisa lebih mengetahui mengenai badan legislatif mahasiswa, yang dimana dengan adanya sosialisasi tersebut maka akan adanya ketertarikan dari mahasiswa yang lain untuk mengikuti organisasi badan legislatif mahasiswa. Karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh badan legislatif mahasiswa akhirnya banyak mahasiswa yang kurang tertarik untuk bergabung, khususnya yang mempunyai gender laki-laki, atas dasar itulah terjadi ketidaksetaraan jumlah gender dalam organisasi badan legislatif mahasiswa pendidikan sosiologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. N., Afifah, N., & Meydiana, D. A. (2022). *Kesetaraan Gender dalam Lingkup Organisasi pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya Tahun 2021*. *ARCHETYPE: Jurnal Ilmiah Psikologi dan Terapan*, Vol. 4, No.2, 41-50.
- Setiawan, R., & Ainun, R. (2021). *Kapital Sosial Organisasi Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sosiologi (Himadiksio) Kabinet Inspiratif di Era Pandemi Covid-19*. *RESIPROKAL*, Vol. 3, No. 1, 105-119.
- St. Nurbayan, & Irfan. (2018). *Gender dan Organisasi Kemahasiswaan (Studi pada Keterlibatan Perempuan dalam Organisasi Kemahasiswaan di STKIP Bima)*. *EduSociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. II, No. I, 28-37
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukei, Keppi., dkk. (2021). *Sosiologi Gender: Konsep dan Aplikasinya di Pedesaan*. Malang: UB Press.
- Dalimoenthe, I. (2021). *Sosiologi Gender*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Bungin, Burhan. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Darahim, Andarus. (2003). *Kendala Upaya Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: Yayasan Melati.
- Demartoto, Argyo. (2007). *Menyibak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel*. Surakarta: LPP UNS dan UNS Press.
- Fakih, Mansour. (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putra, Heddy Shri Ahimsa. (2000). *Ketika Orang Jawa Nyeni, Seni dalam Beberapa Perspektif: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Galang Press.
- Rancangan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender Tahun 2012